

REKAP 2: PROGRAM K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)

TAHUN ANGGARAN 2025

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA

:

DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)
2. SASARAN STRATEGIS K/L YANG DIDUKUNG

:

01 - Meningkatnya kualitas legislasi RUU (termasuk memberikan pandangan dan pendapat serta pertimbangan atas RUU
02 - Meningkatnya kualitas pengawasan atas pelaksanaan UU dan peraturan perundang-undangan lainnya (termasuk pemantauan dan peninjauan serta pemantauan dan evaluasi
07 - Terselenggaranya dukungan sidang dan rapat DPD RI yang efektif dan efisien
3. PROGRAM

:

Program Penyelenggaraan Lembaga Legislatif dan Alat Kelengkapan

4. PRIORITAS NASIONAL

KODE	PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	ALOKASI 2025 (RIBU)
01	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia	1.775.550,0
01.03	Penguatan Lembaga Demokrasi	1.775.550,0
Total		1.775.550,0

5. SASARAN PROGRAM (OUTCOME) DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)

KODE	SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	TARGET 2025	ALOKASI 2025 (RIBU)
01	Tersedianya dukungan bahan dan keahlian legislasi RUU		502.264.542,0
01.01	Nilai tertimbang dukungan bahan legislasi RUU sesuai standar	6	
01.02	Nilai tertimbang dukungan keahlian legislasi RUU sesuai standar	1	
02	Tersedianya dukungan bahan dan keahlian pandangan dan pendapat atas RUU Usul Pemerintah atau DPR		26.107.124,0
02.01	Nilai tertimbang dukungan bahan pandangan dan pendapat atas RUU Usul Pemerintah atau DPR sesuai standar	0,1	
02.02	Nilai tertimbang dukungan keahlian pandangan dan pendapat atas RUU Usul Pemerintah atau DPR sesuai standar	0,2	
03	Tersedianya dukungan bahan dan keahlian pertimbangan atas RUU mengenai APBN dan RUU lainnya		273.100,0

KODE	SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	TARGET 2025	ALOKASI 2025 (RIBU)
03.01	Nilai tertimbang dukungan bahan pertimbangan atas RUU mengenai APBN dan RUU lainnya sesuai standar	0,2	
03.02	Nilai tertimbang dukungan keahlian pertimbangan atas RUU mengenai APBN dan RUU lainnya sesuai standar	0,2	
04	Tersedianya dukungan bahan dan keahlian hasil pengawasan atas pelaksanaan UU sesuai ASMASDA		145.805.029,0
04.01	Nilai tertimbang dukungan bahan hasil pengawasan atas pelaksanaan UU berdasarkan ASMASDA sesuai standar	0,1	
04.02	Nilai tertimbang dukungan keahlian hasil pengawasan atas pelaksanaan UU berdasarkan ASMASDA sesuai standar	3,4	
05	Tersedianya dukungan bahan dan keahlian tindak lanjut hasil pemantauan dan peninjauan terhadap pelaksanaan UU sesuai ASMASDA		1.726.647,0
05.01	Nilai tertimbang dukungan bahan tindak lanjut hasil pemantauan dan peninjauan terhadap pelaksanaan UU berdasarkan ASMASDA sesuai standar	0,1	
05.02	Nilai tertimbang dukungan keahlian tindak lanjut hasil pemantauan dan peninjauan terhadap pelaksanaan UU berdasarkan ASMASDA sesuai standar	0,3	
06	Tersedianya dukungan bahan dan keahlian tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi atas Ranperda dan Perda sesuai ASMASDA		8.124.363,0
06.01	Nilai tertimbang dukungan bahan tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi atas Ranperda dan Perda sesuai ASMASDA	0,2	
06.02	Nilai tertimbang dukungan keahlian tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi atas Ranperda dan Perda sesuai ASMASDA	0,2	
07	Terselenggaranya dukungan sidang dan rapat DPD RI yang sesuai aturan		0,0
Total			684.300.805,0

6. OUTPUT PROGRAM DAN INDIKATOR OUTPUT PROGRAM

KODE	OUTPUT PROGRAM / INDIKATOR OUTPUT PROGRAM	ALOKASI 2025 (RIBU)
Total		0,0

7. KEGIATAN DAN PENDANAAN

KODE	PROGRAM	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2025											PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)		
		RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL	2026	2027	2028
3858	Pengelolaan Kesekretariatan Pimpinan DPD	48.840.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	48.840.000,0	0,0	0,0	0,0
3863	Penyelenggaraan Fungsi Legislasi, Pertimbangan, Pengawasan DPD, dan Pengembangan Kerja Sama DPD	93.522.342,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	93.522.342,0	0,0	0,0	0,0

KODE	PROGRAM	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2025											PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)		
		RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL	2026	2027	2028
3864	Penyelenggaraan Fungsi Legislasi, Pertimbangan, Pengawasan DPD, dan Penyerapan Aspirasi Masyarakat dan Daerah Oleh Anggota DPD RI	537.488.463,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	537.488.463,0	0,0	0,0	0,0
3962	Pengkajian Aspirasi Masyarakat dan Kebijakan Anggaran Daerah	2.325.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.325.000,0	0,0	0,0	0,0
3963	Perancangan Perundang-undangan dan Pengkajian Kebijakan Hukum	2.125.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.125.000,0	0,0	0,0	0,0
Total		684.300.805,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	684.300.805,0	0,0	0,0	0,0

Jakarta, 20 Mei 2025